

BAB I PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Anggaran adalah rencana terperinci, yang dinyatakan secara kuantitatif, yang menentukan bagaimana sumber daya akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu alat utama sistem analisis dan perencanaan keuangan (Financial Planning & Analysis System), anggaran memiliki lima tujuan utama yaitu (a) perencanaan; (b) memfasilitasi komunikasi dan koordinasi; (c) mengalokasikan sumber daya; (d) mengendalikan keuntungan dan operasi dan (e) mengevaluasi kinerja dan memberikan insentif (Hilton & Platt, 2015). Anggaran merupakan alat pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin, Welsch, Hilton dan Gordon ,2007) dalam Sujana (2010). Serta keakuratan penyusunan anggaran dapat ditentukan dengan membandingkan angka-angka aktual dengan angka-angka dalam anggaran baik dalam dollar maupun unit. Keakuratan anggaran lebih tinggi apabila angka-angka dari kedua sumber ini tidak berbeda jauh (Shim & Siegel, 2000).

Salah satu cara untuk menyusun anggaran adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran menurut Shim & Siegel (2000) para manajer departemen harus memiliki input yang penting dalam menganggarkan pendapatan dan biaya karena mereka terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan departemen mereka. Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi karyawan agar memperbaiki kinerja dan sikap. Karyawan harus dapat memberikan rekomendasi, merevisi angka-angka

dalam anggaran bila diperlukan, dan menyetujui ataupun tidak menyetujui item-item yang utama. Input karyawan diperlukan karena mereka sangat memahami operasi (Shim & Siegel, 2000). Sedangkan Murray dalam Sumarno (2005) dalam Sujana (2010) menyatakan bahwa partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja dari anggota organisasi tersebut.

Partisipasi seluruh tingkat manajemen mulai dari proses penyusunan anggaran mulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran dapat memberikan pengaruh positif dalam mencapai tujuan organisasi (Arifin W, 2012) dalam Irfan, Santoso, & Effendi (2016).

Konsekuensi positif dari partisipasi anggaran ialah informasi dapat disampaikan dengan baik sehingga dapat memenuhi target namun sebaliknya jika informasi yang disampaikan kurang tepat maka akan menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik/atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan baik itu dalam kinerja aktual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan atau organisasinya (Anthony dan Govindarajan, 2005) dalam Irfan et al., (2016). Sedangkan Sulistyanto (2006) dalam Sujana (2010) menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah yang disebabkan oleh perbedaan sumber dan akses informasi.

Kondisi asimetri informasi menyebabkan timbulnya kekenduran anggaran. Kekenduran anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2005) dalam Irfan et al., (2016). Menurut Ikhsan dan Ishak (2008) dalam Sujana (2010) kekenduran adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. Kekenduran anggaran diciptakan dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah, membuat rencana biaya lebih tinggi, atau menyatakan terlalu jumlah input yang tinggi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output. Eisenhardt dan Stevens dalam Sujana (2010) menyebutkan empat kondisi penting sehingga kekenduran anggaran dapat terjadi yaitu Pertama, terdapat asimetri informasi antara manajer (bawahan) dengan atasan mereka. Kedua, kinerja manajer tidak pasti. Jika terdapat kepastian dalam kinerja, maka atasan dapat menduga usaha manajer melalui output mereka sehingga senjangan anggaran sulit untuk dilakukan. Ketiga, manajer mempunyai kepentingan pribadi. Keempat, adanya konflik tujuan antara manajer dengan atasan mereka.

Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap timbulnya kekenduran anggaran sudah banyak dilakukan seperti penelitian Sujana (2010) yang dilakukan di hotel-hotel berbintang di Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kekenduran anggaran. Alasan dugaan bahwa bawahan cenderung tidak melakukan kekenduran anggaran untuk meminimalkan risikonya.

Namun diperoleh hasil penelitian Sujana (2010) bahwa variabel asimetri informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kekenduran anggaran. Hal ini disebabkan oleh kekenduran anggaran yang terjadi ditentukan oleh adanya perbedaan kepemilikan informasi antara bawahan dan atasan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rukmana, 2013) dengan populasi yang berbeda yaitu beberapa universitas yang berlokasi di Semarang karena populasi penelitian sebelumnya adalah pemerintah Kota Padang, yang terdiri dari Kepala Daerah dan 45 SKPD berupa 1 inspektorat, 9 Badan, 18 Dinas, 6 Kantor dan 11 Kecamatan. Peneliti sebelumnya menilai bahwa terjadi kekenduran anggaran pemerintah Kota Padang yang mana dana tunjangan operasional bagi rapat anggota dewan, dimana data yang diketahui sebesar puluhan miliar rupiah untuk bersidang dan melakukan perjalanan dinas. Setiap anggota dewan juga akan mendapatkan laptop yang dibeli dengan dana APBD Sumatera Barat sebesar Rp. 960.000.000, . Dari jumlah anggaran yang disediakan untuk 55 orang anggota dewan, dapat diperkirakan harga laptop yang disandang para wakil rakyat itu lebih kurang Rp. 17,5 juta per unit. Melihat harga laptop yang ada di pasaran dewasa ini rata-rata dibawah Rp 12 juta per unit, masyarakat merasa tindakan pemerintah dalam anggaran dana untuk pemilihan laptop sangatlah berlebihan.

Ketidaktepatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pengalokasian sumberdaya mengakibatkan kekenduran anggaran yang menimbulkan pemborosan uang rakyat. Peneliti melihat dari segi fenomena yang sudah dipaparkan tadi, maka semakin memperkuat indikasi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya

anggaran yang terjadi pada penyusunan anggaran pemerintahan Kota Padang. Peneliti memakai metode data primer dengan mengirimkan kuisisioner kepada 45 SKPD yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Pemerintah Kota Padang serta menggunakan metoda total sampling karena sampelnya kurang dari 100 subjek, yaitu sebanyak 90 responden dari 45 SKPD. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan negatif terhadap kekenduran anggaran, serta mendapat kesimpulan bahwa semakin tinggi asimetri informasi maka senjangan anggaran akan semakin tinggi.

Penelitian Irfan et al., (2016) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kekenduran anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kekenduran anggaran. Penelitian Sinta Tiara Putri (2017) menunjukkan hasil pengujian hipotesis bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kekenduran anggaran dan variabel partisipasi anggaran yang dimoderasi asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kekenduran anggaran SKPD di provinsi Riau. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Putranto (2012) dimana hasil pengujian hipotesis ditolak yang artinya informasi asimetri tidak memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan kekenduran anggaran. Namun penelitian Mulyani (2012) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kekenduran anggaran.

Pengertian Perguruan Tinggi yang tertulis dalam Undang-undang Tahun 2012 (RI, 2012) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan

dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Dengan mengacu pada PP no 17 tahun 2010, maka Perguruan Tinggi memiliki 3 program utama yaitu (a) Pendidikan, (b) Penelitian dan (c) Pengabdian kepada masyarakat atau digabung menjadi satu program yaitu Akademik. Dan program utama tersebut dapat dilengkapi dengan program lainnya, yaitu (a) Pembinaan Kemahasiswaan. (b) Pengelolaan Sumber Daya, dan (c) Pelayanan. Setelah dilakukan pengelompokan program, maka ditentukan aktifitas dan Sub aktifitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung program. Rumusan tersebut sebaiknya mengacu pada PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengingat bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91) dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (pasal 3) dan pedoman penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (RI, 2003) tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketentuan itu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pengelolaannya. Selanjutnya di dalam

ketentuan itu juga disebutkan bahwa sumber dana, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2005) perguruan tinggi dapat merumuskan standar pengelolaan keuangan sesuai dengan situasi lingkungan internal dan eksternal, yang secara singkat dapat digambarkan melalui analisis lingkungan strategis (Renstra & Renop) sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi. RKAT pada hakikatnya adalah panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam setiap pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dengan RKAT setiap kegiatan diharapkan dapat diikuti dan di pertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan perencanaan. Dengan perkataan lain, setiap kegiatan yang didasarkan atas RKAT dapat dijamin akuntabilitasnya.

Menurut buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2005) Tahapan penyusunan RKAT dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, disusunlah rencana strategik berupa tindakan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Secara ringkas unsurnya terdiri atas Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan diakhiri dengan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, indikator kinerja yang ditetapkan harus memenuhi syarat untuk mengukur tingkat keberhasilan (Anonim,2000) yaitu (a) spesifik dan jelas;(b) dapat diukur secara objektif;(c) relevan;(d) efektif. Setelah RKAT disusun, akan diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan thridharma yang direncanakan dalam anggaran yang direncanakan. Dalam pembuatan RKAT tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya kekenduran anggaran masih cukup tinggi , mengingat banyak sekali perguruan tinggi yang ada di indonesia sehingga setiap perguruan tinggi ingin menunjukkan performa mereka termasuk dalam hal pendanaan. Kemungkinan munculnya kekenduran anggaran bukan untuk mencari keuntungan pada masing-masing pihak yang bersangkutan namun lebih kepada mengantisipasi jika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dalam Perguruan Tinggi juga terdapat proses penyusunan anggaran namun sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan tidak adanya *reward* maka penelitian ini ingin membuktikan apakah masih memungkinkan terjadi kekenduran anggaran didalam lingkup perguruan tinggi, serta masih sedikit riset tentang perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pembuatan anggaran tentunya akan melakukan estimasi dengan cara menaikkan biaya untuk mengantisipasi hal-hal tertentu yang akhirnya menyebabkan kekenduran anggaran. Di universitas masing-masing program studi membuat anggaran tiap tahunnya untuk melaksanakan program-program selama setahun kedepan. Setiap informasi dan pengalaman yang

ada diharapkan dapat membantu dalam pembuatan anggaran, namun ada kalanya informasi setiap orang berbeda yang disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah kurangnya komunikasi. Serta setiap individu memiliki kemampuan mengestimasi yang berbeda dengan kemampuan estimasi yang rendah dan perbedaan informasi maka dapat menimbulkan asimetri informasi. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti pengaruh prartisipasi anggaran terhadap kekenduran anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi.



I.2.Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas,maka dapat kami rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Apakah asimetri informasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap timbulnya kekenduran anggaran dalam lingkungan universitas?

I.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini :

Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap timbulnya kekenduran anggaran dengan asimetri informasi sebagai variabel moderasi dalam lingkungan universitas.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di sampaikan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah :

I.4.1 Kontribusi riset, dengan mengaplikasikan model riset kekenduran anggaran ke obyek yang berbeda yaitu universitas maka riset ini akan menambah external validity.

1.4.2. Kontribusi praktik, dengan adanya penelitian ini diharapkan perguruan tinggi dapat menyusun anggaran dengan mekanisme yang detail untuk mengurangi asimetri informasi , sehingga resiko yang harus ditanggung unit-unit oleh unit bisa menurun.